



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah **2024**

bkad.purwakartakab.go.id
081-993-040-040
Jl. Gandanegara No. 25
Purwakarta



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja BKAD yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja BKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD dan SKPKD sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024- 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 3 (tiga) Tahun.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, BKAD Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dalam setiap tahunnya.

LAKIP tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024- 2026 dan penyusunan pelaporan tahun ketiga dengan menggunakan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis perangkat daerah. Dimana Pada tahun 2024 BKAD Kabupaten Purwakarta telah menetapkan indikator kinerja sasaran dengan gambaran realisasi capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Kinerja BKAD Tahun 2024



Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa dari Sasaran I **“Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** dan Sasaran II **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah”** terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang diukur yaitu :

1. Indikator Kinerja : **Capaian SAKIP Perangkat Daerah**

yang ditargetkan mencapai predikat A, tercapai di Tahun 2024 yaitu memperoleh predikat A atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

2. Indikator Kinerja : **Indeks Kepuasan Masyarakat**

yang ditargetkan mencapai predikat BAIK, tercapai di Tahun 2024 yaitu memperoleh predikat SANGAT BAIK atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023.

3. Indikator Kinerja : **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

yang ditargetkan mencapai predikat BAIK, tercapai di Tahun 2024 yaitu memperoleh predikat BAIK atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sampai akhir triwulan IV .

4. Indikator Kinerja : **Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah**

yang ditargetkan mencapai predikat BAIK, tercapai di Tahun 2024 yaitu memperoleh predikat BAIK atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai akhir triwulan IV

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut bukan tanpa permasalahan atau kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Permasalahan yang terjadi di Tahun 2024 ini yaitu diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024 Dengan diterbitkannya regulasi tersebut Pemerintah Daerah tidak fleksible dalam mengatur belanja yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal serta menjadikan adanya perubahan dalam prioritas perencanaan dan penganggaran Sehingga banyak program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak berjalan dengan optimal. Oleh karena itu

diperlukan berbagai upaya perbaikan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja yang belum sepenuhnya tercapai sesuai yang diharapkan dan direncanakan.

Purwakarta, Februari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19731102 199901 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Sampurasun,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 telah selesai disusun. Sebagaimana diketahui bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Penyusunan Laporan kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta program dan kegiatan dalam kurun waktu satu Tahun anggaran, pengukuran kinerja dan transparansi kepada masyarakat serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BKAD Kabupaten Purwakarta.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 masih memerlukan banyak perhatian khusus dalam hal percepatan penanganannya. Namun keterlibatan dan dukungan aktif serta peran seluruh kelembagaan yang ada di BKAD telah menunjukkan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas dalam pelaksanaan kinerja BKAD selama kurun waktu Tahun 2024 ini.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Purwakarta, Februari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST. MM

Pembina Utama Muda / (IV/c)

NIP. 19731102 199901 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi	8
1.5. Sistematika Penyajian	9
Bab II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis.....	10
2.2. Perjanjian Kinerja.....	14
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran.....	17
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2024	26
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	29
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD.....	30
3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional dan Instansi Sejenis.....	31
3.1.5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.....	37

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	45
3.1.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	51
3.1.8. Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Analisis Kinerja.....	52
3.2. Realisasi Anggaran.....	62
Bab IV. P E N U T U P	69

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN :

1. SK IKU BKAD Tahun 2024-2026
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Struktur Organisasi
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2024
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2024
6. Rencana Strategis BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026
7. Rencana Kinerja Tahunan
8. Rencana Aksi Tahun 2024
9. Cascading Kinerja
10. Crosscutting Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu unsur paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah adalah dimanfaatkannya sistem pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Agar tuntutan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dapat dicapai, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang optimal.

Keberhasilan atas pengelolaan keuangan daerah akan mempunyai dampak langsung terhadap otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance*. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas juga merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Selaras dengan prinsip *good governance* maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus disertai dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab yang dibuktikan dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu,

masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan kinerja anggaran.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka BKAD Kabupaten Purwakarta perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan aktivitas kerja pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran melalui Rencana Kerja BKAD Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara reuiu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.
11. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 920/KEP.16-BKAD/2024 tentang Penetapan Pejabat di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah , yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 49 Tahun 2023, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan, khusus

yang berkenaan dengan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi dan aset Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan Badan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi BKAD selaku Bendahara Umum Daerah, berwenang:

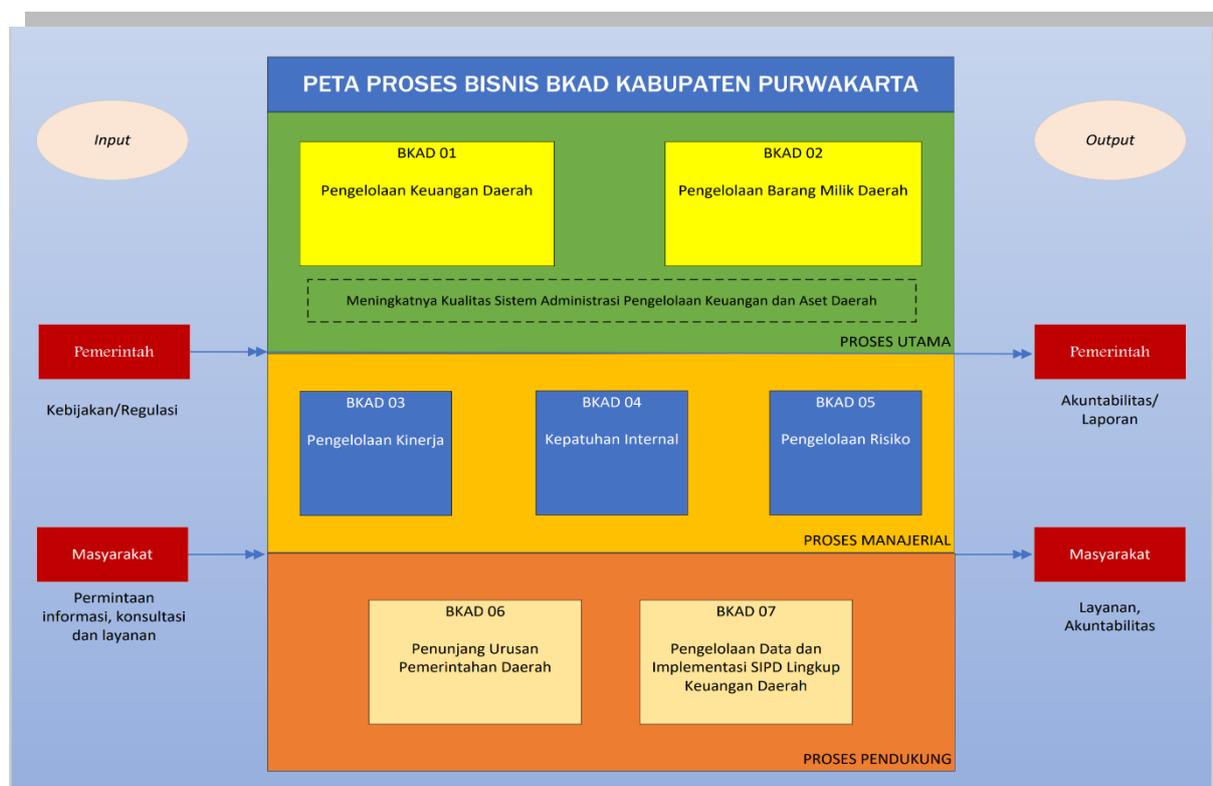
- a) 4menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c) melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan 4sistem4 penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
- e) menetapkan Surat Penyediaan Dana;

- f) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- g) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- h) menyajikan informasi Keuangan Daerah;
- i) melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah

untuk menggambarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dapat terlihat dalam Peta Proses Bisnis BKAD sebagaimana Gambar berikut

:

Gambar 1
Peta Proses Bisnis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta



Adapun Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang Anggaran, terdiri atas :

1. Subbidang Penyusunan Anggaran;

2. Subbidang Penetapan Anggaran; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi, terdiri atas :

1. Subbidang Perbendaharaan;

2. Subbidang Akuntansi; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas :

1. Subbidang Perencanaan Aset;

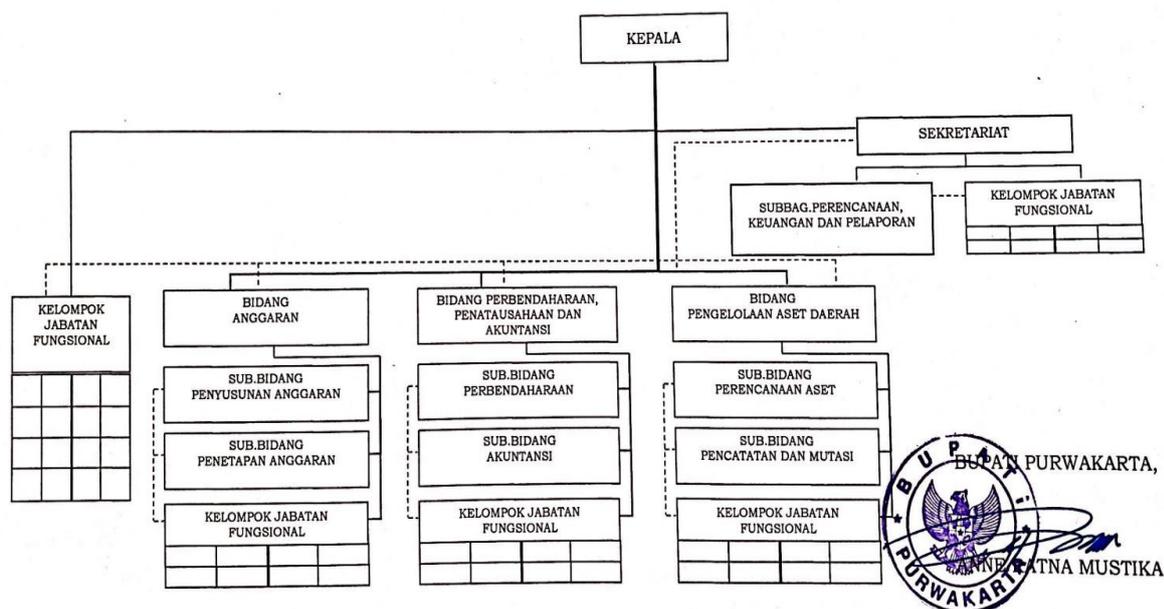
2. Subbidang Pencatatan dan Mutasi; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara umum Struktur organisasi BKAD Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan desain Tipe B, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah



1.4. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan, Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKAD pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi pasca terjadinya pandemi *Covid-19*;
2. Proses integrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui SIPD belum dapat berjalan secara optimal;
3. Masih perlu dilakukan penyempurnaan prosedur operasi baku (*Standard Operating Procedure*) atas pelayanan keuangan dan aset daerah;
4. Pengelolaan Aset Daerah belum diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara lengkap;

5. Belum optimalnya Inventarisasi aset daerah;
6. Belum optimalnya penataan arsip/dokumen;
7. Digitalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
8. Sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi.
9. Reformasi birokrasi.
10. Pembangunan Zona Integritas dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Purwakarta.

1.5. Sistematika Penyajian

LAKIP BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Peta Proses Bisnis, Gambaran Umum Tugas dan Fungsi, Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi BKAD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*Strategic planning*) suatu organisasi. Perencanaan strategis membantu mengalokasikan sumber-sumber untuk mendayagunakan kekuatan dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, serta sejalan dengan tugas dan fungsi BKAD di bidang keuangan yang berkenaan dengan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi dan aset Daerah, BKAD menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024- 2026 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dalam tiga tahun ke depan, Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu :

**"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL
KARIMAH"**

Visi tersebut menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Dalam upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
- 2) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
- 3) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
- 4) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.
- 5) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh BKAD adalah Misi Kelima yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”** dengan Tujuan dan Sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BKAD dapat pula dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran BKAD sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		
					Tahun 2024	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih,	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A

LAKIP BKAD TAHUN 2024

	Efektif dan Akuntabel	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
2		Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
			Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

Sumber : RENSTRA BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, BKAD telah menentukan strategi dan arah kebijakan untuk lima tahun mendatang seperti yang tertuang dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024-2026

Visi : Purwakarta Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah
Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah

	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Secara Terpadu	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berbasis perencanaan terintegrasi yang efektif, efisien dan tepat sasaran
			Mengoptimalkan pengelolaan aset barang milik daerah secara tertib dan efektif

Sumber : Dokumen RENSTRA BKAD Tahun 2024-2026

2.2. Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap

tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : PR.07/Kep.16-BKAD/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2.3
Perumusan Indikator Sasaran Pelayanan
Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Predikat IKM hasil survey kepuasan masyarakat	Predikat	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah seluruh indeks pada setiap dimensi	Predikat	Baik
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter x bobot parameter	Predikat	Baik

Sumber : Dokumen SK IKU BKAD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis I,

Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Kinerja : Capaian SAKIP Perangkat Daerah . Dengan target kinerja pada Tahun 2024 adalah A .

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2024 adalah BAIK.

Sasaran Strategis II,

Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah.

Indikator Kinerja : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah . Dengan target kinerja pada Tahun 2024 adalah BAIK .

Indikator Kinerja : Indeks Pengelolaan Barang Milik. Dengan target kinerja pada Tahun 2024 adalah BAIK.

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) program dengan rincian sebagaimana Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 83,123,034,198,-,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 368,559,390,834,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1,785,774,690,-	APBD
JUMLAH		Rp. 453,468,199,722,-	APBD

Sumber : Dokumen Perubahan TAPKIN Tahun 2024 BKAD Kab. Purwakarta

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Selaras dengan penetapan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat dukungan anggaran terhadap pelaksanaan perencanaan kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan di lingkungan BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 meliputi 3 Program, 14 kegiatan dan 71 sub kegiatan. Namun dari struktur program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terbagi menjadi dua kategori yakni struktur yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran dan struktur yang tidak berkaitan langsung atau sebagai penunjang atas pencapaian sasaran, sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Struktur Anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Berkaitan
Langsung dengan Pencapaian Sasaran pada BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun
2024

Sasaran		Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		368,559,390,834
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3,776,729,000
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	131,779,000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	148,965,000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	638,750,000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	457,000,000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	72,192,000
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	229,990,000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	718,060,000
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	960,559,000
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	419,434,000
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,084,725,000
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	224,986,000
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	46,000.000
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	124,945,000

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	49,992,000
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	125,000,000
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	131,189,000
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	382,613,000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	730,918,000
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	160,230,000
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	545,968,000
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	24,720,000
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	362,564,540,834
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	309,266,062,000
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17,442,711,647
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	35,855,767,187
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	402,478,000
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	292,398,000
		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	110,080,000
	2.	Program Pengelolaan	1,785,774,690

LAKIP BKAD TAHUN 2024

		Barang Milik Daerah	
			Pengelolaan Barang Milik Daerah
			1,785,774,690
			Penyusunan Standar Harga
			200,000,000
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
			44,500,000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah
			172,000,000
			Inventarisasi Barang Milik Daerah
			222,566,000
			Pengamanan Barang Milik Daerah
			551,692,000
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka
			92,202,000
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			64,962,000
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			171,687,000
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
			266,165,690
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran			370,345,165,524

Sumber : DPPA BKAD Kab. Purwakarta Tahun 2024

Tabel 2.6
Struktur Anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran pada BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Sasaran		Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		83,123,034,198
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92,342,100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,097,300
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9,984,700
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9,955,100

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,142,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,163,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75,194,170,882
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75,159,210,682
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9,960,200
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,000,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22,525,000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12,525,000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	983,220,000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	327,500,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	101,460,000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	504,260,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,863,707,992
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60,000,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500,587,992
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	449,820,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,000,000

LAKIP BKAD TAHUN 2024

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210,000,000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	159,300,000
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	374,000,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	971,259,000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0
		Pengadaan Mebel	199,532,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	721,727,000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,530,890,224
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302,200,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,223,690,224
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,464,919,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271,700,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	397,219,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000
Total Anggaran Pendukung			83,123,034,198

Sumber : DPPA BKAD Kab. Purwakarta Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai akuntabilitas tingkat pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu bagian dari akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* penting realisasi kinerja aktual Tahun 2024 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan kinerja tahun berjalan dengan RENSTRA BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD abupaten Purwakarta khususnya Misi ke-5 yaitu **“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat”**. Dimana untuk mewujudkan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat tersebut, maka bentuk dukungan BKAD Kabupaten Purwakarta adalah dengan menyusun serta menyajikan seluruh

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan lainnya sehingga diperoleh Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah serta Indeks Pengelolaan Aset Daerah yang Baik.

Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja BKAD yang bersumber dari Bidang di lingkungan BKAD Kabupaten Purwakarta kemudian diolah, dievaluasi, dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKAD Kabupaten Purwakarta.

Alat bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Penghitungan persentase pencapaian rencana kinerja (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut

:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91≤100	Sangat Baik
2.	76≤90	Tinggi
3.	66≤75	Sedang
4.	51≤65	Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta diukur melalui pencapaian indikator kinerja pada seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : PR.07/Kep.16-BKAD/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 yang terdapat 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indicator.

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten purwakarta juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten purwakarta tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian Kinerja BKAD Tahun 2024



Sumber : BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, Data Diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) indikator yang diukur telah mencapai target 100%, yaitu :

1. Indikator Kinerja : Capaian SAKIP Perangkat Daerah . Dengan target kinerja pada Tahun 2024 adalah A dengan capaian kinerja A (100%)

2. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2024 adalah BAIK dengan capaian kinerja SANGAT BAIK (113,25%)
3. Indikator Kinerja : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah . Dengan target kinerja pada Tahun 2024 adalah BAIK dengan capaian kinerja BAIK (100%)
4. Indikator Kinerja : Indeks Pengelolaan Barang Milik. Dengan target kinerja pada Tahun 2024 adalah BAIK dengan capaian kinerja BAIK (100%).

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan terdapat Penentuan bobot Dimensi IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sama dengan 15 (lima belas);
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sama dengan 20 (dua puluh);
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sama dengan 15 (lima belas);
4. Penyerapan anggaran sama dengan 20 (dua puluh);
5. Kondisi keuangan daerah sama dengan 15 (lima belas); dan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD sama dengan 15 (lima belas).

Hasil pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi :

1. peringkat baik dengan nilai A
2. peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, dan
3. peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C

sedangkan pada tahun 2023 IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut :

1. Penganggaan Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk pelaksanaannya, serta Pengelolaan Kas dan Utang Jangka Pendek belum memadai;
2. Pemberian tunjangan lain diluar TPP-ASN Berdasarkan Beban Kerja PNS pada Tiga SKPD tidak memiliki dasar hukum yang memadai;
3. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Belum tertib; dan
4. Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas (PSU) Belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purwakarta antara lain agar menginstruksikan :

1. Menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun APBD mempertimbangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara rasional dapat dicapai, kepastian ketersediaan dana yang bersumber dari PAD dalam penyusunan anggaran belanja; serta menindak lanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas rancangan perda APBD.
2. Mengevaluasi Peraturan Bupati (Perbup) Purwakarta Nomor 102 Tahun 2022. Peraturan Bupati (Perbup) Purwakarta Nomor 108 Tahun 2022. Peraturan Bupati (Perbup) Purwakarta Nomor 11 Tahun 2023 dengan memedomani peraturan yang berlaku.
3. Memerintahkan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menyusun strategi dalam rangka melakukan validasi secara menyeluruh atas Piutang PBB-P2 sejak pelimpahan dari KPP Pratama secara bertahap, terukur, dan sistematis.
4. Menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) untuk melakukan pengamanan asset tetap PSU yang di alihfungsikan oleh pihak

yang tidak berhak pada 6 perumahan yang telah diserahterimakan dan 5 perumahan yang akan diserahterimakan.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

3.1.2 Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan kinerja tahun – tahun sebelumnya dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama yang sudah di sesuaikan dengan dasar Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 serta Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026, berikut realisasi dan perbandingan kinerja IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2022-2023		Tahun 2024		Ket
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan kualitas sistem administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	-	-	-

LAKIP BKAD TAHUN 2024

2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	-	-	A	A	Tercapai 100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	-	Baik	Sangat Baik	Melampaui 113,25%
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	-	-	Baik	Baik	Tercapai 100%
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Predikat	-	-	Baik	Baik	Tercapai 100%

Sumber : BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

Dari uraian table 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang mendukung pelaksanaan kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta tingkat capaian kinerjanya mencapai **100%**, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pada BKAD berdasarkan Skala Nilai kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPD

Berikut Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026:

Tabel 3.3
Kemajuan Capaian Sasaran Strategi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir RPD (2026)	Tingkat Kemajuan
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A (89,35)	A	100

LAKIP BKAD TAHUN 2024

	Bersih, Efektif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Baik	113,25
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	100
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Baik	Baik	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024, capaian IKU kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta telah berhasil mencapai target yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2024-2026.

3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Provinsi dan Instansi Sejenis

Perubahan kondisi otonomi daerah merupakan rangkaian dari agenda kebijakan agar pemerintah daerah dapat menciptakan good governance dan clean government dengan melakukan tata Kelola pemerintahan dengan baik. Otonomi daerah juga menuntut Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Pada kenyataannya, banyak Pemerintah Daerah belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni dalam hal keseluruhan proses manajemen pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan aset daerahnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah Daerah seringkali memiliki informasi yang terbatas mengenai kesehatan keuangan dan kekayaan daerahnya termasuk bagaimana mengukur kegiatan manajemen dan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan cara yang tepat dan reliabel.

Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya kualitas kinerja pengelolaan atas keuangan dan aset daerah di tataran Pemerintah daerah khususnya pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang mana kondisi dimaksud didapatkan dari hasil pengukuran

seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yakni melalui pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD)

- Perbandingan Predikat BAIK Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan**
 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2020 tentang pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pasal 19 ayat (1) dan Hasil pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi: A. peringkat baik dengan nilai A; peringkat perlu perbaikan dengan nilai B; dan peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C. Pemerintah Kabupaten Purwakarta meraih predikat **BAIK** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023. Berikut Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2021-2023.

Tabel 3.4
Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2021-2023

Dimensi/Subdimensi	2021	2022	2023	Keterangan
Kabupaten Purwakarta/ Total Indeks	77,523	76,778	79,962	Perlu Perbaikan
Dimensi 1 : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	11,701	9,133	11,486	
Dimensi 2 : Pengelolaan anggaran belanja dalam APBD	20,00	19,83	19,828	
Dimensi 3 : Transparansi pengelolaan keuangan daerah	7,758	15,00	15,00	

Dimensi 4 : Penyerapan anggaran	20,00	15,00	15,00	
Dimensi 5 : Kondisi keuangan daerah	3,063	2,818	3,648	
Dimensi 6 : Opini BPK	15,00	15,00	15,00	

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa kinerja atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purwakarta dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut berada pada kategori perlu perbaikan. Artinya kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah di Purwakarta masih dibawah target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya yaitu dengan kategori kinerja **“Baik”**.

Jika dibandingkan dengan **pencapaian kinerja di tingkat provinsi Jawa Barat**, Pemerintah Kabupaten Purwakarta termasuk salah satu Kabupaten yang berhasil mempertahankan predikat BAIK sebagaimana berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Kabupaten	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Indeks Total	Nilai
Bandung	12,214	19,828	10,862	15	2,261	15	75,165	B
Bandung Barat	8,957	20	14,741	10	5,326	15	74,024	B
Bekasi	13,061	15	15	15	3,461	10,005	71,526	B
Bogor	9,187	15	7,759	20	4,389	0	56,335	C
Ciamis	8,811	19,828	15	15	3,989	15	77,628	B
Cianjur	12,016	19,655	14,483	15	2,84	15	78,994	B
Cirebon	12,996	15	14,741	15	5,068	15	77,806	B
Garut	12,05	15	14,741	15	3,779	15	75,569	B

LAKIP BKAD TAHUN 2024

Indramayu	10,957	15	15	15	5,79	15	76,746	B
Karawang	10,132	20	14,741	15	8,127	15	83	A
Kuningan	8,62	19,828	7,5	15	3,5	15	69,448	B
Majalengka	8,886	14,483	14,224	15	5,456	15	73,049	B
Pangandaran	9,166	20	12,672	10	0,815	5,01	57,664	B
Purwakarta	11,486	19,828	15	15	3,648	15	79,962	B
Subang	11,408	14,655	14,224	15	5,29	15	75,577	B
Sukabumi	12,995	14,31	14,224	20	5,192	15	81,721	A
Sumedang	13,905	15	15	15	4,748	15	78,653	B
Tasikmalaya	10,721	20	15	20	5,047	15	85,769	A
Kota Bandung	10,783	20	14,741	15	7,558	5,01	73,093	B
Kota Banjar	11,427	14,483	14,741	20	4,433	15	80,084	A
Kota Bekasi	12,541	20	15	15	3,778	5,01	71,33	B
Kota Bogor	8,561	14,828	13,707	15	2,037	15	69,132	B
Kota Cimahi	9,686	14,828	14,224	13,333	4,182	15	71,253	B
Kota Cirebon	9,043	14,655	14,483	6,667	5,096	15	64,943	B
Kota Depok	13,454	19,828	14,741	20	3,297	15	86,319	A
Kota Sukabumi	12,995	14,31	14,224	20	5,192	15	81,721	A
Kota Tasikmalaya	10,721	20	15	20	5,047	15	85,769	A

Sumber : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024

Adapun terhadap kinerja pengelolaan aset daerah, Kabupaten Purwakarta baru melakukan pengukuran atas Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD) secara mandiri (Self Assessment) melalui aplikasi SPIP dari BPKP Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024 disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK bahwa pengukuran kinerja pengelolaan barang milik daerah secara nasional baru dilakukan terhadap 10 (sepuluh) pemerintah daerah sebagaimana dapat dilihat pada table 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Hasil Pengukuran IPBMD Kategori Pemerintah Daerah
Tahun 2023 dan 2024

No	Pemda Piloting	IPBMD Th 2023 (Skala 1-4)	Target IPBMD Th 2024 (Skala 1-4)
1	Pemprov Riau	2,31	2,47
2	Pemprov Kepulauan Riau	2,56	2,72
3	Pemprov DKI Jakarta	2,21	2,37
4	Pemprov Jawa Barat	2,60	2,76
5	Pemprov Jawa Tengah	3,24	3,40
6	Pemprov Jawa Timur	2,51	2,67
7	Pemprov Sulawesi Utara	2,68	2,84
8	Pemprov Sulawesi Selatan	2,11	2,27
9	Pemprov Bali	2,91	3,07
10	Pemkot Denpasar	2,74	2,90

Sumber : Deputi Bid. Koordinasi & supervise KPK Tahun 2024

Pengukuran atas kualitas pengelolaan BMD dimaksudkan untuk mendorong perbaikan tata kelola BMD dalam 4 Aspek sasaran kinerja yaitu :

1. Pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan barang milik daerah terhadap peraturan perundang-undangan;

3. Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang efektif; dan
Administrasi barang milik daerah yang andal.

Adapun Kendala dan permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- a. LHP BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan/kekurangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, walaupun Kabupaten Purwakarta telah meraih Opini WTP selama 9 kali berturut-turut;
- b. Masih kurangnya koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah maupun dengan pihak swasta/stakeholder sehingga memperlambat tercapainya tujuan program dan kegiatan;
- c. Aturan dari pemerintah pusat tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sering mengalami perubahan dengan cepat;
- d. Keterbatasan SDM yang memahami pengelolaan keuangan daerah sehingga masih terdapat temuan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta keterlambatan dalam penyampaian Laporan Keuangan SKPD;
- e. Penatausahaan BMD belum memadai karena kurangnya kompetensi dari Pengurus Barang sehingga terjadi keterlambatan pelaporan dan pencatatan administrasi masih belum sempurna;

- f. Dokumen kepemilikan aset bidang tanah tidak lengkap sehingga terdapat kesulitan dalam melakukan proses sertifikasi;
- g. Pemanfaatan aset (tanah dan bangunan) dalam bentuk Kerjasama belum didukung perjanjian dan pengaturan hak/kewajiban yang memadai;
- h. Tumpang tindih pengakuan dan pencatatan aset oleh lebih dari satu Pemda/Instansi dan/atau OPD;
- i. Penyelesaian sengketa pemanfaatan/kepemilikan aset dan proses TGR atas aset yang hilang berlarut-larut;

Permasalahan tersebut bisa menjadi risiko karena mungkin akan terjadi di masa depan dan menimbulkan dampak jika tidak ditangani. Permasalahan bisa menghambat pencapaian tujuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan risiko tersebut yang kemungkinan akan muncul setiap tahun dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan praktik tata Kelola serta fungsi manajemen yang baik agar risiko yang ada tidak menimbulkan kejutan dan tujuan organisasi dapat diyakini tidak terganggu pencapaiannya.

3.1.5 Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Secara menyeluruh pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 dengan 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan BKAD Kabupaten Purwakarta sudah tercapai 100% atau dapat dikatakan bahwa

kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta di Tahun 2024 mencapai predikat **Sangat Baik**.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
- 2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah**

Deskripsi sasaran :

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengelolaan keuangan daerah sebagai sebuah rangkaian kegiatan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dimana secara jelas ditetapkan beberapa hal yang menjadi landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Keseluruhan proses tersebut telah dilaksanakan dengan baik atau tidaknya tercermin dari adanya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang

disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur, akuntabel dan transparan pada satu periode pelaporan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* di Kabupaten Purwakarta melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta selaku perangkat daerah yang memiliki fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah berupaya terus menerus melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata atas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purwakarta sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Purwakarta, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis BKAD Tahun 2024-2026 dimana secara langsung dapat mendukung terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolak ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, serta merupakan proses pertanggungjawaban manajerial

dan unsur pengendalian manajemen di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula program dan kegiatan prioritas guna mendukung pencapaian target terhadap kinerja peningkatan tata Kelola keuangan dan aset daerah antara lain melalui **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** dan **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**. Dimana pencapaian kinerja di setiap program yang telah dilaksanakan selama periode Tahun Anggaran 2024 dapat diukur dan dilihat seperti dalam Tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100%	<p>a. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun perlu adanya penyempurnaan dokumen-dokumen perjanjian kinerja (PK) penetapan indicator kinerja program agar dirasionalisasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga antara target kinerja dan tingkat capaian tersajikan real.</p> <p>b. Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengukuran kinerja juga dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment. Namun tidak melampirkan bukti kertas kerja pelaporan (sebagai bukti dilakukannya monitoring dan evaluasi secara</p>	<p>a. Telah ditetapkan indikator kinerja pada Renstra tahun 2024-2026 yang lebih rasional baik dari sisi kualitas maupun kuantitas</p> <p>b. Kedepannya, dalam penyusunan laporan akan melampirkan kertas kerja dari masing-masing bidang yang mencakup semua elemen penting, seperti periode pelaporan dan ringkasan pencapaian kinerja.</p> <p>c. Kedepannya, dalam penyusunan LAKIP akan menggunakan perbandingan capaian kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta dengan capaian target nasional/regional disertai informasi hambatan-hambatan,</p>

					<p>berjenjang dalam bentuk pelaporan tertulis) hasil kinerja dari mulal jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Badan</p> <p>c. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar dan menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Serta telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Namun Agar Terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan data perbandingan capaian target nasional, regional (Provinsi serta menyiapkan informasi permasalahan hambatan kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya penyelesaiannya.</p> <p>d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai sehingga berdampak pada Implemetasi SAKIP yang telah meningkat. Agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara</p>	<p>strategi dan upaya penyelesaiannya</p> <p>d. Dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja akan melampirkan dokumentasi dengan format pelaporan hasil kinerja yang standar dan mudah dipahami, mencakup semua elemen penting seperti identitas pelapor, periode pelaporan, ringkasan pencapaian kinerja dan rencana tindak lanjut</p>
--	--	--	--	--	---	--

						berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung sampai kepada badan.	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK	SANGAT BAIK	113,25%	Kualitas pelayanan yang baik, respons yang baik terhadap masukan masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai dan keterbukaan informasi terkait layanan dan kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan waktu pelayanan yang kurang cepat. Hal ini disebabkan ada beberapa produk layanan yang berhubungan dengan pihak ketiga dan memiliki SOP dan cara kerja yang berbeda	Melaksanakan sosialisasi atau memberikan info melalui media sosial mengenai SOP layanan dan waktu proses layanannya.
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	BAIK	BAIK	100%	Indeks pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Secara 3 Tahun berturut-turut telah mencapai kategori perlu perbaikan dan pada tahun 2024 meraih nilai 79,952 Artinya kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah di Purwakarta masih dibawah target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya yaitu dengan kategori kinerja "Baik"	Melaksanakan perbaikan pemenuhan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai maksimal Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sama dengan 15 (lima belas), Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sama dengan 20 (dua puluh), Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sama dengan 15 (lima belas), Penyerapan anggaran sama

LAKIP BKAD TAHUN 2024

							dengan 20 (dua puluh);, Kondisi keuangan daerah sama dengan 15 (lima beles), dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD sama dengan 15 (lima belas).
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	BAIK	BAIK	100%	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Purwakarta baru melakukan pengukuran atas Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD) secara mandiri (Self Assessment) melalui aplikasi SPIP dari BPKP Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2024	Melaksanakan perbaikan pemenuhan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam penilaian Pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan produktif, Kepatuhan pengelolaan barang milik daerah terhadap peraturan perundang-undangan, Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang efektif, dan Administrasi barang milik daerah yang andal.

Sumber : IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024, Data Diolah.

Berdasarkan tabel di atas hasil Analisis keberhasilan, Kegagalan dan Solusi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang mendukung kepada pencapaian tujuan/sasaran, dapat disimpulkan dari Indikator Kinerja Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat diselesaikan mencapai 100%

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.8
Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program Yang Mendukung Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	Tercapai
Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15%	15,74	Melampaui
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	89%	74,29	Tidak Tercapai
		Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	Tercapai

LAKIP BKAD TAHUN 2024

		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	76,14%	89,76%	Melampaui
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,03%	3,7%	Melampaui
		Persentase SILPA terhadap APBD	1,58%	3,6%	Melampaui
		Persentase belanja pendidikan (20%)	35%	26,79%	Tidak Tercapai
		Persentase belanja kesehatan (10%)	25%	17,55%	Tidak Tercapai
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	1,74	1,00	Tidak Tercapai
		Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai
		Kesesuaian Dokumen Penganggaran	6 Skor	6 Skor	Tercapai
		Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	20 Skor	20 Skor	Tercapai
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	8 Skor	8 Skor	Tercapai
		Penyerapan Anggaran	20 Skor	14,29 Skor	Tidak Tercapai
		Kondisi Keuangan Daerah	4 Skor	3,6 Skor	Tidak Tercapai

	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	YA	YA	Tercapai
		Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	100%	100%	Tercapai
		Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	30%	33.83%	Melampaui
		Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	46,09%	Baru 50% opd
		Persentase pengolah BMD yang dibina	100%	100%	Tercapai
		Persentase penyusutan/ penghapusan BMD	100%		
		Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Baik	Cukup	Tidak Tercapai

LAKIP BKAD TAHUN 2024

		Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Baik	Cukup	Tidak Tercapai
		Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Baik	Cukup	Tidak Tercapai
		Administrasi BMD yang Andal	Baik	Cukup	Tidak Tercapai

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta 2023, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 27 (Duapuluh Tujuh) Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan. Terealisasi mencapai target sebanyak 15 (Lima Belas) IKK dan tidak mencapai target sebanyak 12 (Dua Belas) indikator kinerja **“Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)”** dibawah target yang ditetapkan dikarenakan Adanya alokasi hibah pilkada serentak tahun 2024 sehingga, pengalokasian hibah secara formulasi mengurangi persentase rasio. Sedangkan terkait **“Persentase belanja pendidikan (20%)” dan Persentase belanja kesehatan (10%)”** sudah melampaui target yang di tetapkan di Permendagri 86 yaitu sebesar 20% untuk bidang Pendidikan dan 10% untuk bidang Kesehatan hanya saja tidak tercapai untuk target di resntranya. Untuk indikator “Bagi hasil kabupaten/kota dan desa” tidak tercapai karena Belanja Bagi Hasil Kabupaten Purwakarta untuk Desa di hitung berdasarkan realisasi pada tahun berjalan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dengan 2023 berbeda formulasi perhitungannya, 2023 dengan satuan presentase dengan formulasi realisasi belanja / jumlah seluruh anggaran x 100 sedangkan tahun 2024 dengan satuan skor atau

indeks dengan formulasi Skor rata-rata x Bobot. Berikut ringkasan anggaran realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2024:

Tabel 3.9
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Daerah			
A	Pendapatan Asli Daerah	742.445.591.416	622.179.265.828,	83,80
-	Hasil Pajak Daerah	459.958.627.093	374.854.636.153	81,50
-	Hasil Retribusi Daerah	53.011.665.700	42.629.711.319,	80,42
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.635.881.071	6.818.406.753	89,29
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	221.839.417.552	197.876.511.603	89,20
B	Pendapatan Transfer	1.983.321.629.121	1.924.544.675.023	97,04
-	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.492.211.213.000	1.442.049.901.758	96,64
-	Pendapatan Transfer Antar Daerah	207.598.716.000	207.598.716.000	100
	Jumlah Pendapatan	2.727.171.220.537	2.548.061.940.851	93,43
2.	Belanja Daerah			
A	Belanja Operasi	2.150.542.032.966	1.944.506.597.970	90,42
-	Belanja Pegawai	1.051.870.393.883	952.601.620.355	90,56
-	Belanja Barang dan Jasa	997.299.984.785	892.855.618.407	89,53
-	Belanja Hibah	98.451.654.298	97.809.359.208	99,35
-	Belanja Bantuan Sosial	2.920.000.000	1.240.000.000	42,47
B	Belanja Modal	248.209.129.869	231.463.381.607	93,25
C	Belanja Tidak Terduga	15.727.646.176	23.160.000	0,15
D	Belanja Transfer	344.944.349.187	333.200.297.434,	96,60
	Jumlah Belanja	2.759.423.158.198	2.509.193.437.011	90,93
	Surplus/(Defisit)	(32.251.937.661)	38.868.503.840	(120,52)
3.	Pembiayaan Daerah			
A	Penerimaan Pembiayaan	37.251.937.661	37.251.937.661	100,00

LAKIP BKAD TAHUN 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Daerah			
B	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000		
	Jumlah Pembiayaan	32.251.937.661	32.251.937.661	100
	SILPA Tahun 2024	-	71.120.441.501	-

Sumber data: CALK Tahun 2024 (Unaudited)

Salah satu penyebab terjadinya penurunan penyerapan/realisasi anggaran belanja daerah di tahun anggaran 2024 yaitu dikarenakan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024, Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas :

- e. Penggajian formasi PPPK;
- f. Pendanaan kelurahan;
- g. Bidang pendidikan;
- h. Bidang kesehatan; dan
- i. Bidang pekerjaan umum.

Dengan diterbitkannya regulasi tersebut Pemerintah Daerah tidak fleksible dalam mengatur belanja yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokaldan menjadikan adanya perubahan dalam prioritas perencanaan dan penganggaran Sehingga banyak program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak berjalan dengan optimal serta terdapat efesiensi penggunaan sumber daya, Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya tahun 2024, dapat dilakukan dengan melakukan analisis efisiensi atas realisasi sasaran sebagaimana tabel berikut:

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2024
Analisis Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran	Indicator kinerja			Anggaran			
		target	Realisasi	capaian	target	Realisasi	capaian	Tingkat efisiensi
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	A (80-90)	A (89,35)	100%	83,123,034,198	38,835,410,669	46,72%	Sangat Efisien
		Baik	Sangat Baik	113,25%				
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Baik (70-80)	Baik (79,962)	100%	368,559,390,834	338,271,262,499	94,78%	Kurang Efisien
		Baik	Baik	100%				

Dari tabel 3.10, dapat diketahui bahwa:

- a. Sasaran 1: Realisasi kinerja sesuai target (100%), bahkan untuk IKM melampaui target (113.25%). Yang lebih penting, realisasi penggunaan anggaran hanya 46,72% dari target. Ini berarti bahwa target akuntabilitas publik dan kepuasan masyarakat tercapai dengan penggunaan anggaran yang jauh lebih rendah dari yang dialokasikan. Oleh karena itu, tingkat efisiensinya dinilai "Sangat Efisien".
- b. Sasaran 2: Meskipun realisasi capaian kinerja (100%) mencapai target yang ditetapkan, realisasi penggunaan anggaran hampir mencapai target (94,78%). Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai indeks Pengelolaan keuangan Daerah, anggaran yang digunakan hampir sesuai dengan yang dialokasikan. Oleh karena itu, tingkat efisiensinya dinilai "Kurang Efisien". Dan Realisasi kinerja sesuai target (100%) dan penggunaan anggaran 72,27% dari target. Ini menunjukkan bahwa target penerapan sistem merit tercapai dengan penggunaan anggaran yang

lebih rendah dari yang dialokasikan. Oleh karena itu, tingkat efisiensinya dinilai "Efisien"

3.1.8 Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Analisis Kinerja

Adapun kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** diantaranya adalah :

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, bertujuan untuk mengkoordinasikan seluruh proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dimulai dari tahap penyusunan KUA-PPAS sampai dengan tahap penetapan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain :

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4	4 Dokumen	4	Tercapai
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	4	4 Dokumen	4	Tercapai
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	2	2 Dokumen	2	Tercapai
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	Tercapai

LAKIP BKAD TAHUN 2024

Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	2	2 Dokumen	2	Tercapai
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	Tercapai
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	10	4 Dokumen	4	Tercapai
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen	7	4 Dokumen	4	Tidak Tercapai
Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	Tercapai

- 2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, bertujuan untuk melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pemerintah daerah meliputi pengkoordinasian, rekonsiliasi, sinkronisasi dan pembinaan atas pencatatan secara tertib, sistematis, dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah pada satu tahun anggaran. Keberhasilan pencapaian kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain :

LAKIP BKAD TAHUN 2024

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12	14 Dokumen	14	Tercapai
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	3	3 Dokumen	3	Tercapai
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12	20 Dokumen	20	Tercapai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,	-	-	2 Laporam	2	Tercapai

LAKIP BKAD TAHUN 2024

	Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	4	12 Dokumen	12	Tercapai
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	Tercapai
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100	100 Orang	100	Tercapai

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, bertujuan untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi terhadap seluruh perangkat daerah, BLUD dan PPKD dalam penyusunan Laporan

LAKIP BKAD TAHUN 2024

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan pedoman dan kebijakan penyelenggaraan akuntansi daerah. Keberhasilan pencapaian kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain :

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	5	1 Laporan	1	Tercapai
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3	2 Dokumen	2	Tercapai
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2	1 Dokumen	1	Tercapai

- 4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan wewenang berupa delegasi kepada Bendahara Umum Daerah (BUD). Keberhasilan pencapaian kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain :

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	204 Laporan	204	204 Laporan	204	Tercapai
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12	12 Laporan	12	Tercapai
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	183 Desa	183	183 Laporan	183	Tercapai

- 5) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel yang terintegrasi dalam satu sistem. Keberhasilan pencapaian kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain :

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	Tercapai
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	120	115 Orang	115	Tercapai

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** antara lain :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan aset dalam hal Inventarisasi, *legal audit*, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan sistem informasi manajemen aset sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian aset daerah.

Adapun sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja atas kegiatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

LAKIP BKAD TAHUN 2024

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Ket
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	Tercapai
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0	-	-	Tidak ada anggaran sub
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2	2 Dokumen	2	Tercapai
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1	1 Laporan	1	Tercapai
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1	1 Laporan	1	Tercapai
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Laporan	70	1 Laporan	1	Tercapai
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5	2 Dokumen	2	Tercapai
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4	4 Laporan	4	Tercapai

LAKIP BKAD TAHUN 2024

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2	2 Laporan	2	Tercapai
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100	100 Orang	100	Tercapai

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 10 sub kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja kegiatan serta capaian yang paling mendukung program ini adalah pengamanan barang milik daerah, berikut capaiannya :

Tabel 3.11

Capaian Target Kinerja Pengamanan Barang Milik Daerah Atas Proses Sertifikasi Bidang Tanah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 – 2024

Total Aset Bidang Tanah	Bidang Tanah Yang Sudah Sertifikat	Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		Bidang Tanah Yang belum Sertifikasi
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.310	460	83	100	69	266	90	785

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta 2024, data diolah

Bahwa bila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024, tingkat capaian atas proses sertifikasi bidang tanah di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama dan kolaborasi yang semakin baik antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Bidang Pengelolaan Aset Daerah

BKAD dengan *Stakeholder* internal maupun eksternal terutama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purwakarta.

Menurut lokasi sebaran aset bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

**DAFTAR SEBARAN ASET BIDANG TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

No	Lokasi	Belum Sertifikat	Sudah Sertifikat	Jumlah
1	PURWAKARTA	252	128	387
	- DESA	6	0	6
	- KELURAHAN	256	125	381

No	Lokasi	Belum Sertifikat	Sudah Sertifikat	Jumlah
2	PASAWAHAN	53	74	128
3	PONDOKSALAM	26	26	49
4	WANAYASA	26	27	58
5	KIARAPEDES	26	9	34
6	TEGALWARU	35	14	49
7	CIBATU	21	3	23
8	CAMPAKA	44	4	48
9	SUKATANI	24	40	64
10	PLERED	40	69	108
11	MANIIS	25	20	42
12	SUKASARI	20	9	29
13	BOJONG	40	9	48
14	DARANGDAN	39	28	66
15	BUNGURSARI	40	9	51
16	BABAKANCIKAO	26	17	41
17	JATILUHUR	43	30	72
TOTAL		875	435	1310

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta 2023, data diolah

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024, terdapat 2 (Dua) program yang diselenggarakan secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis BKAD sebagaimana struktur anggaran pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.13

**Dukungan Anggaran terhadap Sasaran Kinerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024**

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	368.559.390.834
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.785.774.690
T O T A L		370,345,165,524

Sumber : Perubahan TAPKIN BKAD Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.13. di atas, bahwa Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah**” di dukung oleh 2 (dua) Program yaitu :

- 1) **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**, yang terdiri dari 5 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.
- 2) **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**, terdiri dari 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan.

Adapun realisasi capaian keuangan setiap kegiatan dan sub kegiatan dapat digambarkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Sasaran Utama Per Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2024

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	370,345,165,524	339,561,854,089	91,69%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	368,559,390,834	338,271,262,499	94,78%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3,776,729,000	3,308,125,215	87,59%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	131,779,000	126,479,000	95,89%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	148,965,000	132,879,400	89,20%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	638,750,000	487,917,000	76,39%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	457,000,000	451,315,000	98,76%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	72,192,000	54,058,000	74,88%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	229,990,000	187,486,000	81,52%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	718,060,000	699,395,300	97,40%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	960,559,000	865,763,900	90,13%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	419,434,000	302,831,615	72,20%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,084,725,000	643,135,800	59,29%

LAKIP BKAD TAHUN 2024

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	224,986,000	136,930,000	60,86%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	46,000,000	33,880,000	73,65%
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	124,945,000	36,645,000	29,33%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	49,992,000	23,216,000	46,44%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	125,000,000	34,800,000	27,84%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	131,189,000	56,684,300	43,21%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	382,613,000	320,980,500	83,89%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	730,918,000	607,789,050	83,15%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	160,230,000	152,525,000	95,19%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	545,968,000	445,014,050	81,51%

LAKIP BKAD TAHUN 2024

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	24,720,000	10,250,000	41,46%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	362,564,540,834	333,355,937,434	92,38%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	309,266,062,000	308,106,384,800	99,63%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17,442,711,647	23,160,000	0,15%
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	35,855,767,187	25,226,392,634	70,36%
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	402,478,000	356,275,000	88,52%
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	292,398,000	249,005,000	85,16%
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	110,080,000	107,270,000	97,45%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,785,774,690	1,290,591,590	72,27 %
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,785,774,690	1,290,591,590	72,27%
Penyusunan Standar Harga	200,000,000	137,868,000	91,84%
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan			

LAKIP BKAD TAHUN 2024

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	44,500,000	26,236,200	58,96%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	172,500,000	157,403,100	91,51%
Inventarisasi Barang Milik Daerah	222,566,000	137,868,000	61,94%
Pengamanan Barang Milik Daerah	551,692,000	425,984,400	77,21%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka	92,202,000	24,183,650	26,23%
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	64,963,000	50,683,300	78,02%
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	171,687,000	52,900,900	30,81%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	266,165,690	231,658,690	87,04%
JUMLAH	370,345,165,524	339,561,854,089	91,69%

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta 2024, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan terhadap sasaran dan indikator kinerja utama di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024 mencapai **91,69%**.

Dari hasil analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diuraikan di atas, dapat kemudian di ukur tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja melalui perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 91,69% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.15

**Tingkat Efektivitas Anggaran
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2023**

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	370,345,165,524	339,561,854,089	91,69%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	368,559,390,834	338,271,262,499	94,78%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,785,774,690	1,290,591,590	72,27%

Sumber data: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta 2023, data diolah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 3.12

Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan
1.	> 100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	0 - 60%	Tidak Efektif

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di interval penilaian 90% - 100% dengan nilai rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar **91,69%**. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara **Efektif** efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra Tahun 2014-2026 dan diterapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu Tahun 2024.

LAKIP tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan evaluasi kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dan ketetapan dalam Perjanjian Kinerja (TAPKIN) yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir kinerja sasaran instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 mencapai **100%** sebagaimana rincian pada Tabel berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PENCAPAIAN TAHUN 2024	KET
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat A	Predikat A	Tercapai, 100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat Baik	Predikat Sangat Baik	Tercapai, 113,25%
Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat Baik	Predikat Baik	Tercapai, 100%

Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Predikat Baik	Predikat Baik	Tercapai, 100%
--	------------------	---------------	-------------------

Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan secara keseluruhan mencapai **91,69%**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja BKAD termasuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan tingkat penyerapan dan penggunaan anggaran yang **Efektif**.

Walaupun demikian, keberhasilan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala yang menghambat dalam rangka upaya pencapaian kinerja. Namun permasalahan ini umumnya menyangkut banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian kinerja tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang direncanakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan
- Masih belum optimalnya proses perencanaan setiap kegiatan dan sub kegiatan.
- Belum optimalnya manajemen bagi para pelaksana kegiatan, seperti kurangnya menguasai permasalahan.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan atau kendala di atas, maka pada masa yang akan datang perlu diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat upaya pencapaian kinerja, baik itu untuk kegiatan, program maupun kebijakan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka upaya yang perlu dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas dan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun mendatang, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dan aset melalui pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan dan diseminasi;
2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Perangkat Daerah serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan fungsi konsolidasi dengan perangkat daerah sebagai pengguna anggaran;
4. Meningkatkan koordinasi atau kerjasama serta evaluasi yang berkelanjutan, baik antar unit kerja dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta maupun dengan instansi yang terkait.

Hasil evaluasi/analisis atau laporan akuntabilitas kinerja instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi/perbaikan serta masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan, program, kegiatan sejenis atau yang relevan agar pencapaian kinerja kedepan sesuai dengan yang diharapkan.

Purwakarta, 12 Februari 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19731102 199901 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta Telp/Fax (0264) 200036, 200037, 200038, 200039
Website : www.bkad.purwakartakab.go.id e-mail : info@purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : PR.07/Kep.16-BKAD/I/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 137);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 250 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 250);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);

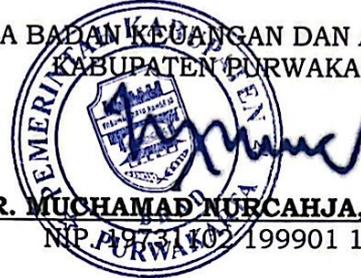
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026 di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 sebagaimana diktum KESATU merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sampai dengan 2026;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM
NIP. PURWAKA 199901 1 001

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : Surat Keputusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor : PR.07/Kep.16-BKAD/1/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 Badan Keuangan dan Daerah Kabupaten Purwakarta

1. Nama Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
2. Tugas : Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Keuangan
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Pembinaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan Badan; dan
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	TARGET		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	BAIK	BAIK	BAIK
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Seluruh Indeks pada Setiap Dimensi	BAIK	BAIK	BAIK
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menjumlahkan Seluruh Nilai pada Indeks Parameter x Bobot Parameter	BAIK	BAIK	BAIK

Purwakarta, 2 Januari 2024
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUDAGALAN AURCAHA, ST., MM
NIP. 31102 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta Telp/Fax (0264) 200036, 200037, 200038, 200039
Website : www.bkad.purwakartakab.go.id e-mail : info@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM**
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **BENNI IRWAN**
Jabatan : Pj. Bupati Purwakarta
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

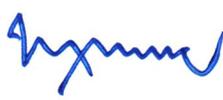
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


BENNI IRWAN


R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

**PERJANJIAN KINERJA JABATAN PIMPINAN TINGGI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	Baik
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Predikat	Baik

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 93.471.119.785,-	APBD
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 394.890.231.719,-	APBD
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.026.007.000,-	APBD
JUMLAH	Rp. 490.387.358.504,-	APBD

Purwakarta, 5 Januari 2024

Pj. Bupati,

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purwakarta


BENNI IRWAN


R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta Telp/Fax (0264) 200036, 200037, 200038, 200039
Website : www.bkad.purwakartakab.go.id e-mail : info@purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM**
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **BENNI IRWAN**
Jabatan : Pj. Bupati Purwakarta
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 1 November 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


BENNI IRWAN


R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

Paraf Pemprakarsa		
R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Paraf Koordinasi		
TIN SUMARTINI, SE, Kp. MM	Asisten Daerah III Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	
NORMAN NUGRAHA	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	Baik
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Predikat	Baik

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 83.123.034.198,-	APBD
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 368.559.390.834,-	APBD
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.785.774.690,-	APBD
JUMLAH	Rp. 453.468.199.722,-	APBD

Purwakarta, 1 November 2024

Pj. Bupati,

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purwakarta


BENNI IRWAN



R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

Paraf Pemprakarsa		
R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Paraf Koordinasi		
TIN SUMARTINI, SE, Kp. MM	Asisten Daerah III Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	
NORMAN NUGRAHA	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

**RENCANA AKSI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Langkah Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Output
								I	II	III	IV	
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,097,300	Membuat Dokumen perencanaan perangkat daerah		√			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,984,700	Membuat penyusunan dokumen RKA-SKPD			√		Tersusunnya penyusunan dokumen RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9,955,100	Membuat penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		√			Tersusunnya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,142,000	Membuat penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	√				Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,163,000	Membuat Dokumen kinerja perangkat daerah	√				Tersusunnya Dokumen kinerja perangkat daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	87,309,587,533	Membuat Dokumen gaji dan tunjangan ASN	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen gaji dan tunjangan ASN
					Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9,960,200	Memverifikasi berkas bantuan keuangan	√				Tersusunnya berkas bantuan keuangan yang terverifikasi
					Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	Membuat Dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	√				Tersusunnya Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD
					Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,000,000	Membuat Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	√				Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10,000,000	Membuat Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	√				Tersusunnya laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
					Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	10,000,000	Membuat Dokumen laporan barang milik daerah pada SKPD	√	√	√	√	Tersusunnya laporan barang milik daerah pada SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	327,500,000	melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	√				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	50,000,000	melaksanakan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	√				Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	198,000,000	melaksanakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan		√			Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	176,000,000	melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		√			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

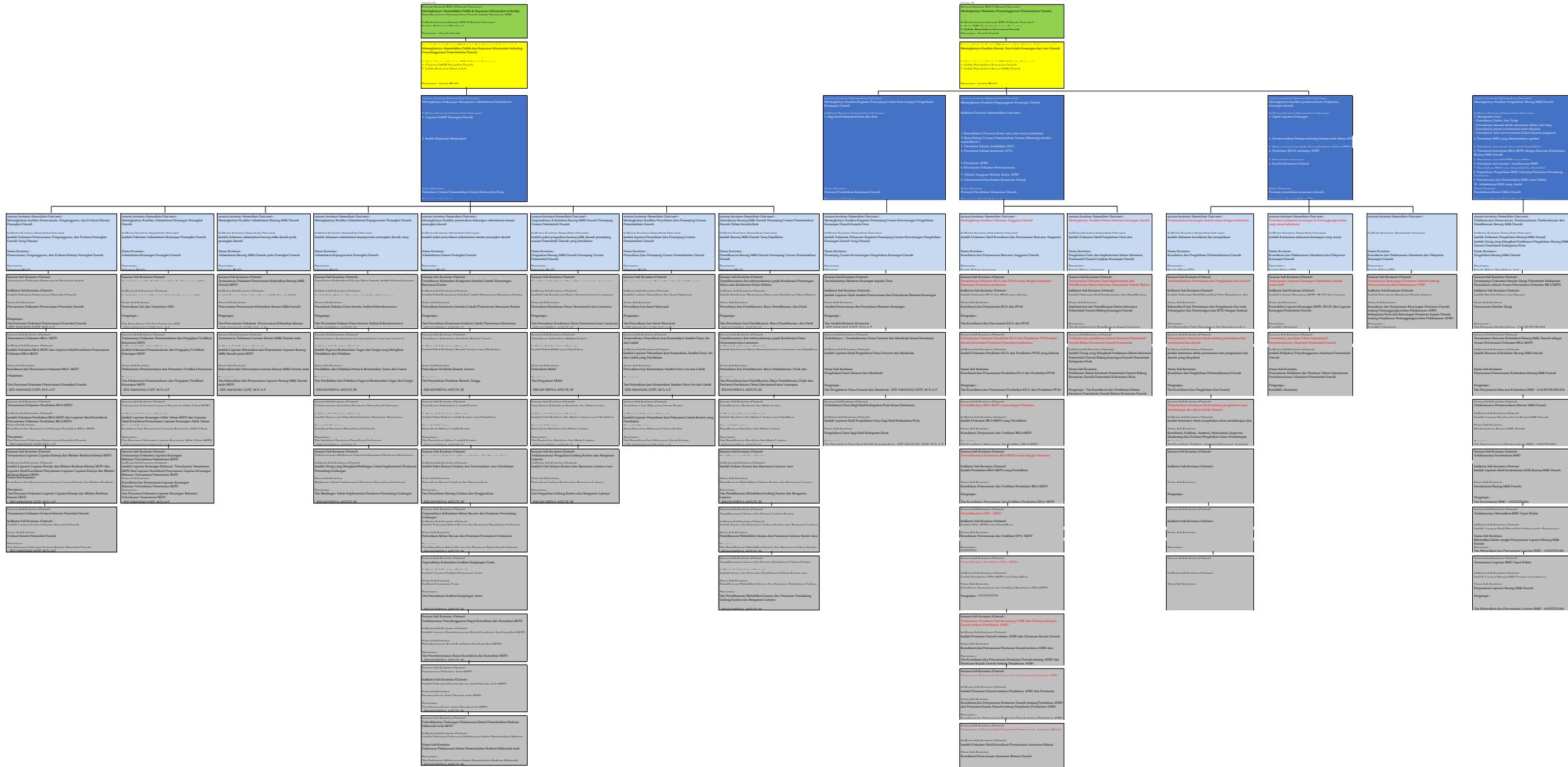
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000	Melaksanakan pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	√				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60,000,000	Melaksanakan pembelian peralatan rumah tangga	√				Tersedianya peralatan rumah tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500,587,992	Melaksanakan pembelian bahan logistik kantor	√	√			Tersedianya bahan logistik kantor
					Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	449,820,000	Melaksanakan pembelian barang cetakan dan penggandaan	√				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
					Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	Melaksanakan penyediaan Bahan Bacaan Peraturan perundang-undangan	√	√			tersedianya Bahan Bacaan Peraturan perundang-undangan
					Fasilitas Kunjungan Tamu	50,000,000	Melaksanakan pembelian kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	√				Tersedianya snak kunjungan tamu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	210,000,000	Melaksanakan Perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	√	√			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
					Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	66,525,000	Melaksanakan penertiban Arsip	√	√			Tersusunnya Arsip
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	74,000,000	Melaksanakan pemeliharaan Server	√	√			Terlaksananya pemeliharaan Server
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	199,532,000	Melaksanakan pembelian mebel	√				Tersedianya mebel Penunjang yang baik
					Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	558,699,000	Melaksanakan pembelian peralatan dan mesin lainnya	√				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	Melaksanakan pembelian materai 10.000	√				Tersedianya Materai 10.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	299,400,000	Melaksanakan pembayaran internet selama 12 bulan	√	√	√	√	Tersedianya Jaringan internet selama 1 Tahun
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,146,965,960	menyediakan asa pelayanan umum kantor (ptt)	√	√	√	√	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,000,000	Melaksanakan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	√				Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	152,000,000	Melaksanakan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√				Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100,000,000	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	400,000,000	Melaksanakan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	√				Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	400,000,000	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	200,000,000	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	√				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Kua Dan Ppas	184,159,000	Membuat Dokumen Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	√	√			Tersusunya Dokumen Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah			Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Kua Dan Perubahan Ppas	198,105,000	Membuat Dokumen Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	√	√	√		Tersusunya Dokumen Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS
					Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Rka-Skpd	459,750,000	Membuat Dokumen penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	√	√	√	√	Tersusunya Dokumen penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
					Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan Rka-Skpd	458,400,000	Membuat Dokumen penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	√	√			Tersusunya Dokumen penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD
					Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Dpa-Skpd	188,092,000	Membuat Dokumen penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	√	√	√	√	Tersusunya Dokumen penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
					Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan Dpa-Skpd	229,990,000	Membuat Dokumen penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	√	√			Tersusunya Dokumen penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
					Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Apbd	751,810,000	Membuat Dokumen penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	√	√			Tersusunya Dokumen penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
					Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Apbd	921,049,000	Membuat Dokumen penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	√	√	√	√	Tersusunya Dokumen penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
					Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	260,000,000	Membuat Dokumen perencanaan anggaran belanja daerah	√	√			Tersusunya Dokumen perencanaan anggaran belanja daerah
				Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	124,986,000	Membuat Dokumen pengelolaan kas daerah	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen pengelolaan kas daerah
					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan Spd	100,000,000	Penetapan SPD SKPD dan koordinasi dengan SKPD	√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan penyusunan SPD
					Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya	124,945,000	Membuat dokumen Rekonsiliasi dana transfer	√		√	√	Tersusunnya Rekonsiliasi dana transfer

					Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (Pfk)	49,992,000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (Pfk)	√			√	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
					Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas Sp2d Dengan Instansi Terkait	125,000,000	membuat dokumen Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	√	√	√	√	Tersusunnya Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
					Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	131,139,000	Membuat SOP Penatausahaan pengelolaan keuangan	√	√			Tersusunnya SOP Penatausahaan keuangan
					Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	282,613,000	Melaksanakan Pembinaan penatausahaan keuangan kepada semua skpd	√	√	√	√	Terlaksananya Pembinaan penatausahaan keuangan kepada semua skpd
				Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan Skpd, Blud Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	103,780,000	Membuat dokumen laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	√	√	√	√	Tersusunnya laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
					Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/Kota	632,670,000	Membuat Dokumen penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
					Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	46,050,000	Membuat Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				√	Terusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan	303,918,370,000	Melaksanakan Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan untuk 183 Desa	√	√	√	√	Terlaksananya Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan untuk 183 Desa
					Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	30,148,344,998	Melaksanakan Pengelolaan dana darurat dan mendesak	√	√	√		Terlaksananya Pengelolaan dana darurat dan mendesak
					Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	44,927,822,558	Melaksanakan Pengelolaan dana bagi hasil 183 Desa	√	√	√	√	Terlaksananya Pengelolaan dana bagi hasil 183 Desa
				Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	292,398,000	melakukan Pemeliharaan terhadap sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan	√	√	√	√	Terpeliharanya sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan

					Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	210,280,000	Melakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	√	√	√		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	200,000,000	Membuat Dokumen Penyusunan standar harga	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen Penyusunan standar harga
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	44,500,000	Membuat Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	√	√	√		Tersusunnya Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	172,000,000	Membuat Dokumen Penatausahaan barang milik daerah	√	√			Tersusunnya Dokumen Penatausahaan barang milik daerah
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	245,226,000	Membuat Dokumen Inventarisasi barang milik daerah	√	√	√		Tersusunnya Dokumen Inventarisasi barang milik daerah
					Pengamanan Barang Milik Daerah	814,632,000	Membuat Dokumen Pengamanan barang milik daerah	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen Pengamanan barang milik daerah
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	188,000,000	Melaksanakan pembangunan bale mahasiswa milik pemda	√	√	√	√	terlaksananya pembangunan bale mahasiswa milik pemda
					Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	64,962,000	Membuat Dokumen Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	171,687,000	Membuat Dokumen Penyusunan laporan barang milik daerah	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen Penyusunan laporan barang milik daerah
					Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	125,000,000	Melaksanakan Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota		√			Terlaksananya Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota

CASCADING BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH TAHUN 2024



**Croscutting Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024**

VISI :
PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

MISI :
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

SASARAN :

- Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
- Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintahan Daerah

- 47 OPD SEKABUPATEN PURWAKARTA
- KEMENDAGRI
- KEMENKEU
- BJB
- TASPEN
- BPKP
- BPK-RI

Sekretariat

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KOTA
Rp. 93.471.119.785**

- Capaian SAKIP Perangkat Daerah : A

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun = 10 Dokumen
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah = 44 Dokumen
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah = 6 Dokumen
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun = 4 Dokumen
- Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah = 25 Paket
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan = 83 Unit
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah = 36 Laporan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara = 86 Unit

**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Rp. 2.026.007.000**

- Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar aset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi aset tahunan 4. Tersedianya nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)
- Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal (100%)
- Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat (25%)
- Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (70%)
- Persentase pengolah BMD yang dibina (100%)
- Persentase penyusutan/ penghapusan BMD (100%)
- Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif (3 Baik)
- Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan (3Baik)
- Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif (3Baik)
- Administrasi BMD yang Andal (3Baik)

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah = 19 Dokumen
- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota = 100 Orang

Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi

**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Rp. 394.890.231.719**

- Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan (15%)
- Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) (85%)
- Opini Laporan Keuangan (WTP)
- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (75,54)
- Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (2,13%)
- Persentase SILPA terhadap APBD (1,74%)
- Persentase belanja pendidikan (20%) (32%)
- Persentase belanja kesehatan (10%) (21%)
- Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (1,80%)
- Penetapan APBD (Tepat Waktu)
- Kesesuaian Dokumen Penganggaran (6Indeks)
- Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD (20skor)
- Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (8Skor)
- Penyerapan Anggaran (20Skor)
- Kondisi Keuangan Daerah (4Skor)

- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah = 23 Dokumen
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah = 52 Dokumen
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah = 4 Dokumen
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun = 4 Dokumen
- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah = 2 Dokumen

